

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang selama ini diterapkan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, telah membawa perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi tetapi juga kesenjangan antara desa dengan kota, sehingga dapat menyebabkan adanya masalah kependudukan diantaranya timbul masyarakat yang dikategorikan miskin atau tertinggal. Pelaksanaan pembangunan desa dewasa ini ternyata terjadi suatu ketimpangan pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seperti desa dengan kota. Hal tersebut mengakibatkan jurang pemisah yaitu di satu pihak terjadi kemajuan yang pesat dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupannya, sedangkan dilain pihak masyarakat tetap pada keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi tersebut maka akan terjadi migrasi yang berasal dari desa-desa tertentu, karena adanya berbagai keterbatasan hidup di pedesaan tersebut sehingga mendorong seseorang atau penduduk bergerak ke kota atau daerah lain untuk perbaikan hidup.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan dan pedesaan yang tidak seimbang menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak, terutama dikaitkan dengan isu kemiskinan dan pemerataan. Salah satu isu yang sering disoroti adalah

tingginya arus migrasi terutama dari desa ke kota yang semakin meningkat intensitasnya (Sunario, 1999).

Migrasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik sifatnya permanen (bertempat tinggal di tempat yang baru paling sedikit 340 hari) atau semi permanen (hanya tinggal selama 15 hari dihitung dari awal kepindahannya ke tempat tersebut), yang melewati batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara atau daerah atau juga melampaui batas politis atau batas negara (Pratiwi, 2007)

Pembangunan yang tidak seimbang dan disparitas antar daerah menyebabkan perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan masalah baik di daerah yang ditinggalkan maupun daerah yang dituju. Daya tarik kota seperti, kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, wiraswasta dan penawaran jasa lainnya, sebagai bagian dari proses modernisasi, antara lain merupakan komponen yang dapat memotivasi sehingga memperbesar arus perpindahan itu baik untuk tujuan menetap, sementara, atau mungkin perpindahan sirkuler (Artika, 2003).

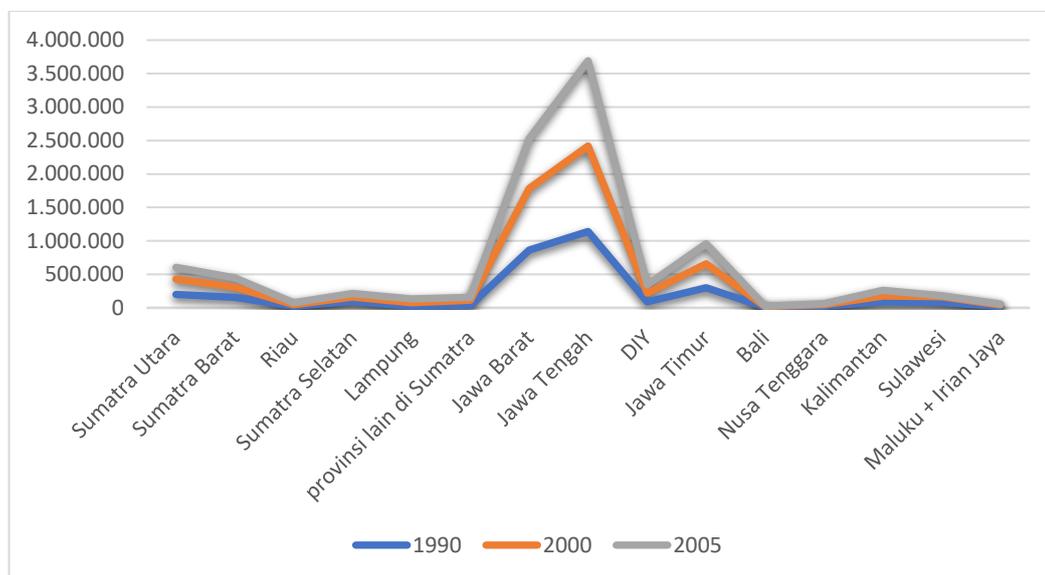
Menurut Todaro dan Smith (2004), kebijakan yang dijalankan pada dekade yang lalu, lebih mengutamakan modernisasi industri, kecanggihan teknologi, dan pertumbuhan metropolis, jelas telah menciptakan ketimpangan geografis dalam penyebaran kesempatan atau peluang-peluang ekonomi, sekaligus menjadi penyebab utama perpindahan secara besar-besaran penduduk desa ke kota yang terus menerus. Pemerintah mementingkan investasi industri untuk bidang sarana umum yang dibangun di kota dengan alasan kota adalah pusat kegiatan ekonomi (Manning dan Effendi, 1985). Hal tersebut merupakan penyebab terjadinya migrasi

penduduk dari desa ke kota. Di pedesaan, pertanian tidak dapat menampung jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dari tahun ketahun, didukung dengan masuknya teknologi sehingga sektor pertanian menjadi padat modal.

Sektor non pertanian di pedesaan hampir tidak berkembang, keadaan sebaliknya bisa terjadi di perkotaan, yaitu luasnya kesempatan untuk dapat bekerja di sektor non pertanian. Hal ini membuat adanya keterkaitan masyarakat desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi yang tidak diperoleh selama mereka tinggal di desa (Suharso, 1994). Migrasi umumnya dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup secara ekonomi. Salah satu daya tarik kota yaitu banyaknya peluang kerja di luar sektor pertanian. Adanya migrasi desa ke kota berakibat pada pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian di kota (Erwindo, 1992)

Sebagai ibu kota dari negara Indonesia, Jakarta menjadi pusat berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perdagangan, industri sampai administrasi, dan pembangunan politik (Hugo, 1979) sehingga tidak terhindarkan lagi bahwa Jakarta menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk dari daerah-daerah lain. Ketersediaan kesempatan kerja dan usaha ekonomi di berbagai bidang, sementara di daerah asal mereka menghadapi keterbatasan kesempatan ekonomi, menyebabkan banyak penduduk bermigrasi ke Jakarta, terutama untuk tujuan ekonomi. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, seperti pendidikan di kota ini juga menjadikan penduduk usia sekolah untuk datang dan tinggal di Kota Jakarta. Oleh karenanya, tidak heran jika hampir seluruh penduduk Jakarta adalah mereka yang berstatus migran. Dari seluruh Provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan

daerah penerima migran masuk terbesar, dimana sekitar 40% penduduknya berstatus migran (Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2000).



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.1**  
**Migran Masuk DKI Jakarta Menurut Tempat Lahir (*Lifetime Migrants*),**  
**Tahun 1990, 2000, dan 2005 (dalam jiwa)**

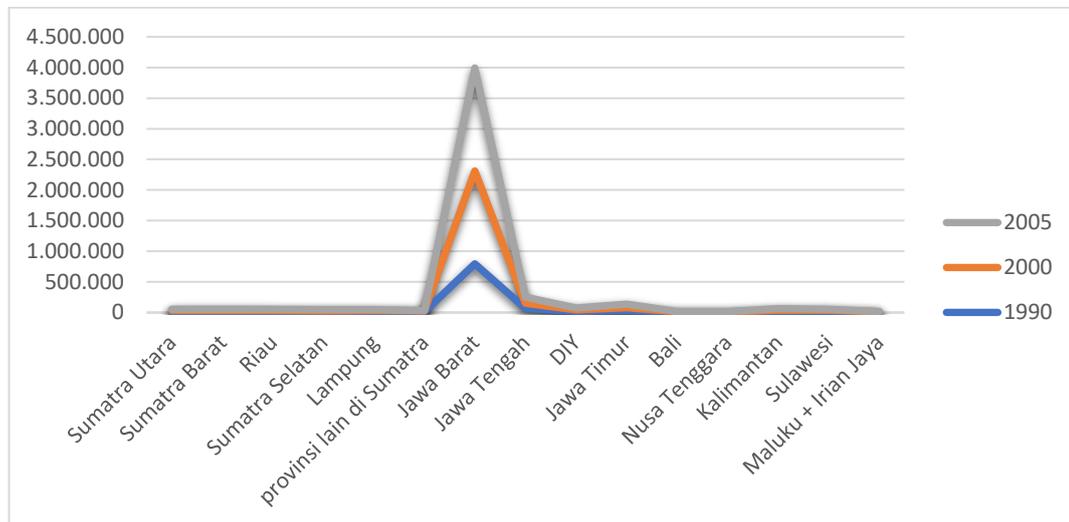
Gambar 1.1 menyatakan migran masuk seumur hidup ke DKI Jakarta pada tahun 1990, 2000 dan 2005 di dominasi oleh mereka yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.274.304 jiwa atau sebesar 41,47%, disusul kemudian berturut-turut oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 743.558 jiwa atau sebesar 24,21%, dan Provinsi Jawa Timur sebesar 9,83%. Selanjutnya tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan juga memberikan kontribusi yang besar pada migran masuk seumur hidup ke DKI Jakarta.

Provinsi di Pulau Jawa memiliki kontribusi di peringkat atas terhadap migrasi ke DKI Jakarta. Hal ini diduga karena ketimpangan upah terlihat begitu tinggi padahal dalam jarak yang relatif dekat sehingga migran mudah mengambil keputusan untuk pindah ke Jakarta. Upah di DKI Jakarta tahun 2010 sebesar 1.118.009 rupiah, provinsi Jawa Tengah 660.000 rupiah sedangkan upah Provinsi Jawa Timur sebesar 630.000 rupiah. Oleh karena itu migran mudah sangat mudah sekali mengambil keputusan untuk melakukan migrasi ke Jakarta.

Bagi pelaku mobilitas penduduk, kota besar seperti Jakarta merupakan daerah tujuan utama bagi mereka. Pada tahun 1990 hingga 2000 migran masuk DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 380.875 jiwa atau naik sebesar 12,13%. Namun pada tahun 2005 migran masuk DKI Jakarta turun sebesar 448.313 jiwa atau sekitar 14,5%. Selain karena turunnya angka fertilitas, migrasi keluar DKI Jakarta (diperkirakan menjadi faktor utama penurunan tingkat migrasi ini dan terlihat dalam jumlah migran keluar Jakarta meningkat sebesar 198.066 jiwa dari tahun 2000 ke 2005 atau sebesar 10,7% (BPS, 2010)

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa arus migran keluar seumur hidup, jumlah migran yang keluar jauh lebih kecil dibandingkan dengan arus masuk. Jumlah migran keluar DKI Jakarta pada tahun 1990, 2000 dan 2005 di dominasi oleh mereka yang berasal dari Jawa Barat, meski jumlah migran keluar DKI Jakarta tiap lima tahun meningkat, namun jumlah migran masuk DKI Jakarta masih cukup tinggi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tujuan utama bagi pelaku mobilitas penduduk adalah DKI Jakarta. Sebagian penduduk yang bermigrasi ke luar Jakarta

adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, termasuk tantara dan pegawai perusahaan swasta yang dimutasikan ke daerah (Hugo, 1979).



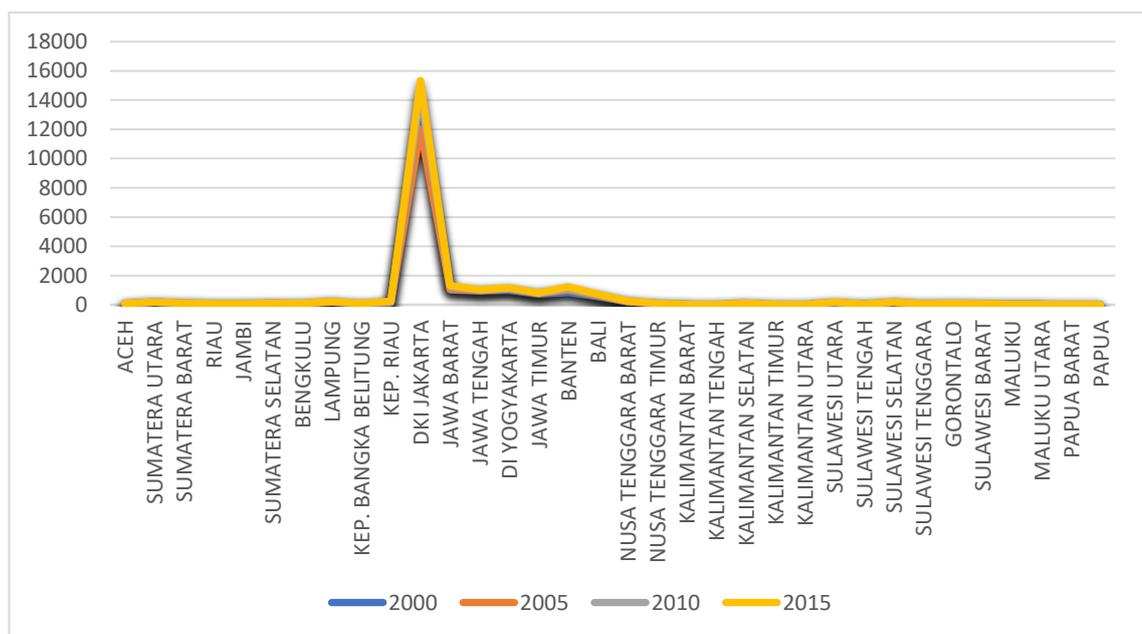
Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2**

**Migran Keluar DKI Jakarta Menurut Tempat Lahir (*Lifetime Migrants*),  
Tahun 1990, 2000, dan 2005 (dalam jiwa)**

Fenomena menarik ditemukan pada arus keluar Jakarta yang cukup besar menuju Provinsi Jawa Barat dengan jumlah yang bahkan lebih besar daripada arus migrasi masuk. Hal ini terjadi karena perkembangannya daerah pemukiman di sekitar Jakarta, terutama di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Banyaknya perumahan yang tersedia di daerah-daerah ini menyebabkan sebagian penduduk pindah meninggalkan Jakarta dengan berbagai alasan. Harga rumah yang lebih rendah mungkin merupakan salah satu alasan bagi penduduk Jakarta untuk ke wilayah tersebut, terutama di antara mereka yang belum memiliki rumah sendiri. Apalagi sekarang di dukung dengan adanya kemajuan Transportasi yang memudahkan penduduk sekitar Jawa Barat dengan cepat sampai ke Jakarta.

Dari jumlah migrasi masuk Jakarta yang relatif besar berdampak pada kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat. Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pada tiap lima tahun kepadatan penduduk DKI Jakarta semakin meningkat sehingga menjadikan Jakarta sebagai Provinsi terpadat dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia. Pada Tahun 2000 kepadatan penduduk di DKI Jakarta sebesar 12.592 jiwa/km<sup>2</sup>, pada tahun 2005 mengalami penurunan sekitar 4,61%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 20,86%, dan tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 5,58%.

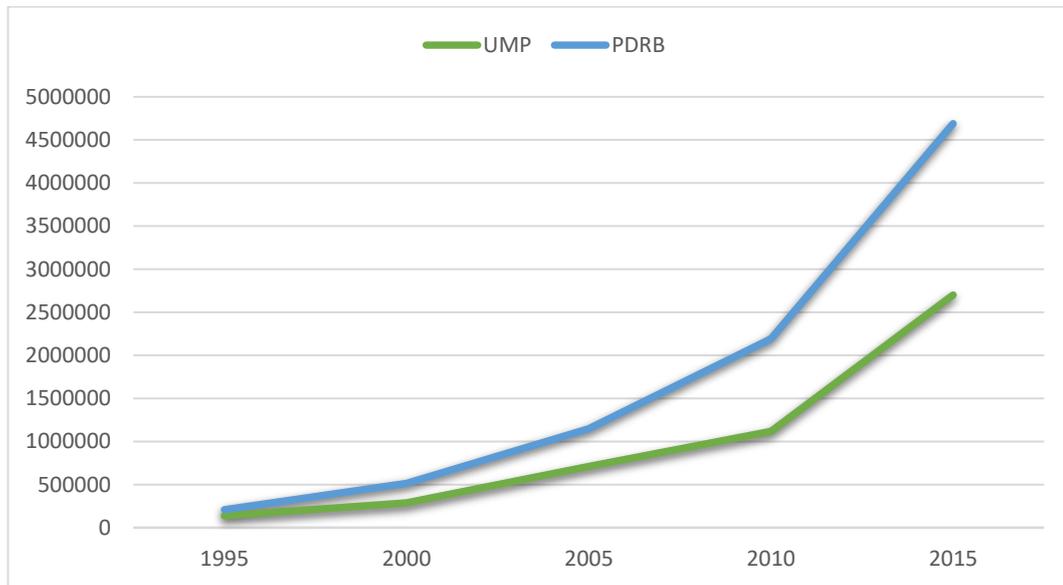


Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.3**  
**Jumlah Kepadatan Penduduk Tiap Provinsi (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**  
**Pada Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015**

Setiap tahun DKI Jakarta kedatangan sekitar 200.000-250.000 penduduk baru yang masuk bersama pemudik pasca lebaran yang sangat besar (Dinas Kependudukan 2005). Apabila melihat dari kepadatan penduduk per kilo meter persegi, Provinsi DKI Jakarta tetap berada pada peringkat paling atas untuk kategori provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu mencapai 14.440 km<sup>2</sup> pada tahun 2010. Di sisi lain, keterlambatan dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di daerah luar Jakarta mengakibatkan masyarakat daerah bermigrasi ke Jakarta untuk mencari pendapatan yang lebih tinggi. Akibatnya terjadi kepadatan penduduk dan pengangguran yang tinggi di Jakarta. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, baik sosial maupun ekonomi, diantaranya kriminalitas meningkat, pemukiman kumuh, kemacetan tinggi, menurunnya tingkat pelayanan dan prasarana perkotaan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk Jakarta. Pentingnya pembangunan di daerah luar Jakarta juga diharapkan dapat membuat tingkat kepadatan penduduk Jakarta dapat teratasi. Migran melakukan migrasi karena tidak adanya lapangan pekerjaan di daerah asal migran, oleh karena itu perlu adanya investasi untuk daerah sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru.

Besarnya jumlah penduduk yang melakukan migrasi ke Jakarta tidak terlepas dari kelemahan pembangunan di daerah luar Jakarta. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat upah di daerah dibandingkan dengan tingkat upah di Jakarta. Pertumbuhan jumlah migrasi ke Jakarta setiap tahun yang relatif besar didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup di Jakarta sementara jumlah lapangan kerja tak mampu lagi menyerap lapangan kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.4**  
**UMP dan PDRB Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015**

Gambar 1.4 menyatakan bahwa DKI Jakarta memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding provinsi lainnya di Indonesia dan ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya upah dari tahun ke tahun hingga saat ini membuat Jakarta menjadi kota tujuan untuk bermigrasi. Rasio UMP di Pulau Jawa sekitar setengah sampai dua pertiga UMP Jakarta. Todaro dan Smith (2004) mengemukakan dalam teorinya bahwa penyebab migrasi adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi UMP di Jakarta maka jumlah migrasi ke Jakarta juga akan semakin besar. Migran memilih pindah ke Jakarta karena melihat upah yang ia akan terima lebih besar dibandingkan dengan upah di daerah asal.

Gambar 1.4 juga mencerminkan secara ekonomi bahwa DKI Jakarta memiliki pembangunan ekonomi yang paling baik dibandingkan dengan pembangunan ekonomi provinsi lainnya. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dilihat dari hal UMP maupun PDRB, keputusan migran berpindah tempat dari daerah asal ke Provinsi DKI Jakarta membuat migran mengorbankan besarnya pendapatan yang seharusnya ia terima di daerah asal untuk mendapatkan pendapatan baru yang ia akan terima di daerah tujuan (Jakarta).

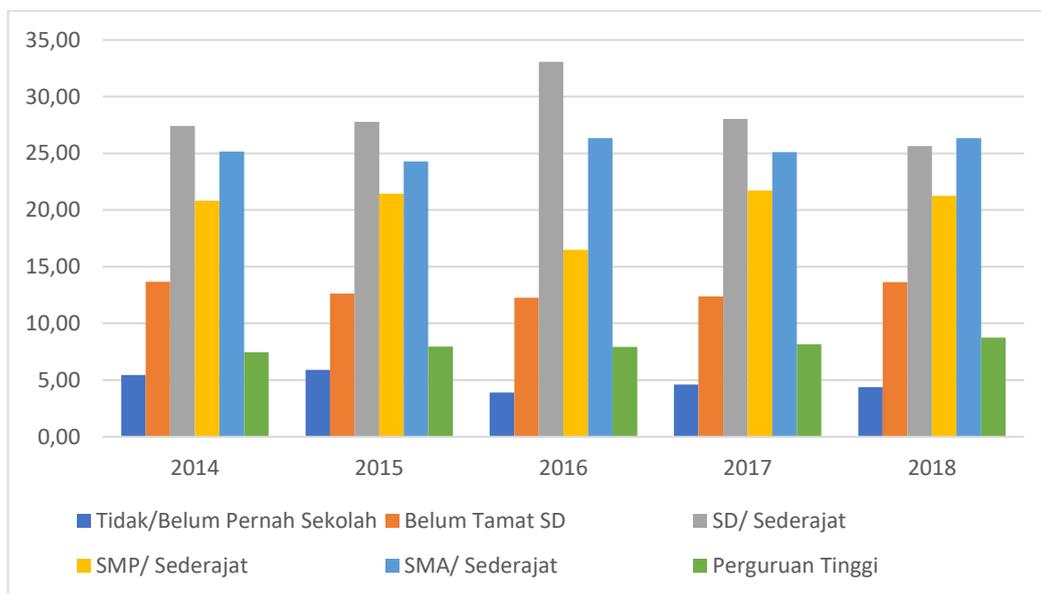
Menurut Sumaryanto dan Halim (1989), arus dan volume migrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor penarik dapat berupa produktivitas kerja yang lebih tinggi di daerah tujuan atau fertilitas yang memungkinkan individu itu memperoleh kehidupan yang lebih baik dari daerah asalnya. Sedangkan daya dorong dapat berupa suatu set perubah yang menyebabkan individu merasa sulit memperbaiki taraf hidupnya di tempat asal.

Secara umum faktor penentu migrasi cenderung pada satu kesimpulan yang hampir sama yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Beberapa teori tentang migrasi menyebutkan bahwa, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya migrasi. Seseorang cenderung melakukan migrasi dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Menurut Mantra (1992) bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan penduduk dari daerahnya ke perkotaan adalah motif ekonomi.

Menurut Manning dan Effendi (1985), migrasi desa-kota merupakan suatu faktor utama yang mendorong pesatnya pertumbuhan kota di negara berkembang. Namun dalam hal ini migrasi yang terlalu cepat dan tidak teratur menyebabkan penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota mengalami kekecewaan karena besarnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan itu sendiri. Para migran yang berasal dari desa rata-rata umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang dimiliki juga terbatas. Tapi adanya persaingan di dunia kerja mengharuskan mereka untuk memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain.

Pelaksanaan pendidikan dasar 12 tahun merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi tuntutan dunia kerja. Faktor yang mempengaruhi migrasi salah satunya yaitu pendidikan. Menurut Ravenstein (1985) menyatakan bahwa penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah. Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah.

Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Tingkat Pendidikan seseorang merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia. Selain itu, tingkat Pendidikan seseorang sangat mempengaruhi mudah tidaknya akses untuk bekerja di sektor non pertanian, terutama akses memasuki dunia industri.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.5**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018**

Pada Gambar 1.5 menggambar bahwa tingkat pendidikan dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat pendidikan mengalami peningkatan kecuali pada tingkat belum tamat SD turun sebesar 7,7% dan pada tingkat SMA/Sederajat turun juga sebesar 3,5%. Pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan hanya pada tingkat SD/Sederajat sebesar 19% dan pada tingkat SMA/Sederajat sebesar 8,5% sisanya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 yang mengalami penurunan yaitu pada tingkat SD/Sederajat sebesar 15,3% dan pada tingkat SMA/Sederajat sebesar 4,8% sisanya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan yaitu pada tingkat belum tamat SD/Sederajat sebesar 10,1%, pada tingkat SMA/Sederajat sebesar 5% dan tingkat perguruan tinggi sebesar 7,5%.

Banyaknya pula migran yang berpendidikan rendah memberanikan diri mengadu nasib datang ke kota dengan tujuan memperoleh pekerjaan atau bahkan ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari daerah asal supaya dapat memperbaiki kehidupannya. Padahal mereka memiliki sumber daya manusia dari segi pendidikan, keahlian dan keterampilan yang pas-pasan akan membuat mereka kalah saing dengan penduduk kota atau penduduk lainnya yang memiliki tingkat pendidikan jauh lebih tinggi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mengetahui tentang faktor apa saja yang mempengaruhi migrasi ke Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI PENDUDUK MASUK KE PROVINSI DKI JAKARTA “**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan secara parsial terhadap Migrasi Penduduk Masuk ke Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan secara bersama-sama terhadap Migrasi Penduduk Masuk ke Provinsi DKI Jakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan secara parsial terhadap Migrasi Penduduk Masuk ke Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan secara bersama-sama terhadap Migrasi Penduduk Masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan baik dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan terkait dengan efisiensi penyebaran penduduk dan tenaga kerja ke DKI Jakarta.

3. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Tasikmalaya melalui pengambilan data dari *website* Badan Pusat Statistik, Bappenas, Lokadata, Katadata, dan *Repository*.

### **1.5.2 Jadwal pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari terbitnya surat keputusan pada tanggal 5 September 2019 diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, penyusunan skripsi dan siding skripsi. Berikut matrik jadwal penelitian ini:

**Tabel 1.1**  
**Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Keterangan	Tahun 2018-2019																							
	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Pengumpulan Data																								
Pembuatan Usulan Penelitian																								
Bimbingan																								
Sidang Usulan Penelitian																								
Revisi Usulan Penelitian																								
Pengolahan Data																								
Penyusunan Skripsi																								
Ujian Skripsi dan Komprehensif																								